

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SEORANG AYAH TERHADAP
ANAK KANDUNGNYA YANG DIBAWAH UMUR**

Syamsuri S. Samauna D 101 10 003

ABSTRAK

Persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya merupakan suatu pemaksaan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan. Dalam hal ini korban dan pelaku memiliki hubungan darah yang sama, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan sedarah dan hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku jauh lebih berat dari pelaku tindak perkosaan biasa. Apakah tepat penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 287 KUHP terhadap kasus persetubuhan anak dibawah umur oleh ayah kandung? Dan bagaimana proses pembuktiannya. Pengadilan Kab. Mamuju Utara menjatuhkan vonis selama 15 tahun penjara. Telah terpenuhi unsur - unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Prosedur pembuktian dalam sidang kasus persetubuhan terhadap Irmawati oleh ayah kandungnya sendiri dilangsungkan secara terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 287 Ayat (1) KUHP dan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : persetubuhan oleh ayah, anak kandung, anak dibawah umur.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-Undang

Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan

perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan apa yang disebut dengan istilah “kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan dan berbagai bentuk perilaku sejenis menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial.”¹.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkup lingkungan keluarga. Dalam suatu lingkungan

keluarga besar terdapat terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak dan lain-lain anggota keluarga. Namun banyak juga dalam keluarga kecil yang hanya terdapat ayah, ibu dan anak. Ayah sebagai seorang kepala keluarga yang memimpin suatu keluarga. Ibu yang bertugas sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah.

Dalam lingkungan keluarga ayah ibu sebagai pasangan suami istri haruslah bisa menjaga keharmonisannya. Apabila pasangan suami istri tidak bisa menjaga hubungan dengan baik maka yang timbul adalah suatu pertengkaran dalam lingkungan keluarga. Pertengkaran dalam lingkungan keluarga dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkungan keluarga yang mana kejahatan ini sangatlah banyak terjadi namun jarang sekali yang terungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung menutup-nutupi atau disembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap suatu aib keluarga.

¹ Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Bandung : Alumni, 2006, hlm 81.

Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain kekerasan fisik, pemukulan oleh Ayah, penganiayaan, kekerasan psikis dan bahkan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Kekerasan yang dilakukan seorang ayah dalam lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam pertumbuhan.²

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak dibawah umur, dan hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene generasi penerus bangsa. Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya tidak lain adalah

kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru di salah gunakan oleh ayah kandungnya sendiri, misalkan akses Internet yang telah berkembang dimana hal ini justru disalah gunakan oleh sebagian besar anak dibawah umur untuk membuka situs-situs Porno hal tersebut berpengaruh terhadap seorang anak.³

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam-ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam suatu keluarga, masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak.

Dalam hukum nasional telah memiliki dasar yuridis dari UUD 1945 sebagai landasan konstitusional serta

²) Novianto D. *Tinjauan Tentang Keturutsertaan Istri Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dibawah Umur*. Surakarta. 2009, hlm 14

³) Setiawan. S. *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*. Surakarta. 2010, hlm 6

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”

Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan masalah tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) dimasyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan.

Diberbagi massa media cetak maupun elektronik banyak diberitakan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan anak dibawah umur yang bersetubuhan dengan ayah kandungnya sendiri.

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana menurut pasal 287 (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya sendiri, dalam pasal itu menyebutkan :

(1) Barang siapa “bersetubuh” dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Sedangkan dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan dalam bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 angka 1. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.

Dalam Pasal 81 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat (3) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal ini tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab,

bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Siapapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya orang yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya. Menurut “**Rita Serenah Kolibonso**”, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan Yayasan penghapusan kekerasan terhadap perempuan:

“Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia

kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali.”⁴

Upaya- upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembagunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang

manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara teguh dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan Negara. Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “Anak” disini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.(UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

⁴) Rukmini M. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. P.T Alumni. Bandung. 2009, hlm21

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan pertanggungjawaban pidana, telah diatur dalam (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- a. Bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-undang baru.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-undang tentang sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 UU No.4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa :

Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan

⁵) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

kehidupan sosialnya, memelihara dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Atas dasar ini anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶ Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah

laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan, keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam hal ini perlu di perhatikan perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan terhadap anak. Perlindungan hukum, dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Peradilan Pidana Anak mengandung pengertian proses pemeriksaan perkara pidana anak, mulai dari tahap penyidikan,

⁶ Arif Gosita. Yang dikutip oleh Maidin Gultom *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989. hlm 18

penuntutan, persidangan dan pemasyarakatan. Jadi penelitian ini mengungkapkan keberadaan peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak terutama UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. anak dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak, baik secara tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana, penerapannya dalam menangani kasus-kasus kenakalan anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan, mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penanggulangannya.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seorang ayah yang menyetubuhi anaknya menurut pertimbangan hakim

pengadilan Negeri kab. Mamuju Utara?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberi keputusan pada pelaku persetubuhan di kab. Mamuju Utara?

II. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK KANDUNG

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Persetubuhan yang dilakukan seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya yang dibawah Umur

Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya kejahatan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur telah dalam KUHP yang antara lain terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, di ancam dengan pidana penjara paling

⁷ (Dalam Bukunya Sri Widoyati Soekito. Yang dikutip oleh Maidin Gultom. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta LP3S) hal 22

lama Sembilan tahun”. Selain itu, untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini berdasarkan asas *lex Spesialis Derogat Lex Generalis* yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan umum.

Kejahatan persetubuhan di atur lebih khusus dalam Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 81 :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit

Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) berlaku pula

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Mengingat tindak pidana persetubuhan terhadap anak menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan. Oleh sebab itu, hakim diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaklah sebanding dengan perbuatannya. Adapun ancaman pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP setinggi-tingginya adalah 9 tahun penjara , sedangkan menurut Pasal 81 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, persetubuhan terhadap anak dengan melakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan di ancam dengan pidana penjara 15 tahun dan paling singkat 3

tahun, denda paling banyak Rp. 300 Juta dan paling sedikit Rp. 60 Juta. Dalam Pasal 81 ayat (2), persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, juga di ancam dengan pidana yang sama. Dari perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang telah diputuskan oleh hakim, berikut uraian antara putusan yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan putusan yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 287 ayat(1) KUHP. 1. Kasus Pertama (Perkara putusan Nomor: 29/Pid.B/2013/PN.PKY.) Dalam kasus pertama ini terdakwa bernama ASRARUDDIN Alias RUDI Bin MAHMUD umur 47 tahun, alamat Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara, Jenis kelamin Laki-laki, Petani dan Sekertaris Yayasan Al Hikmah, Terdakwa didakwa secara kumulatif melakukan tindak pidana, yaitu persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 287 ayat (1)

KUHP. Setelah dilakukannya pemeriksaan sidang pengadilan, dan berdasarkan nuraian pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan si terdakwa akhirnya dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Setelah dilakukannya pemeriksaan sidang pengadilan, dan berdasarkan nurani pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta persidangan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsider tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa oleh

karena salah satu unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi maka majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. Oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat Subsidiaritas, maka terdakwa didakwakan melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yaitu bersetubuh dengan anak kandungnya yang dibawah umur dan terdakwa akhirnya dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun.

B. Kriteria Hakim Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Delik Persrtubuhan dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya

Setelah mengurai pada sub-sub sebelumnya mengenai proses pemeriksaan perkara tindak pidana persetubuhan di pengadilan maka selanjutnya dibahas mengenai implementasi proses peradilan dimaksud dengan menampilkan

perkara pidana yang pernah di proses dalam suatu sidang peradilan pidana :

Berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.B/2013/PN.PKY. Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap Asraruddin Alias Rudi Bin Mahmud Tempat lahir Flores Timur Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan denganya atau orang lain”, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam uraian dakwaan pertama;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asraruddin Alias Rudi Bin Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Dan denda sebesar Rp. 200.000,000, (

dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (3) bulan kurungan.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asraruddin Alias Rudi Bin Mahmud oleh karena itu dengan pidana penjara selam 15 tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan. Dan denda sebesar Rp. 200.000,000, (dua ratus juta rupiah); subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

- Bahwa ia, terdakwa Asraruddin Alias Rudi Bin Mahmud, pada hari senin tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat dirumah bertempat dirumah terdakwa di Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara, kemudian pada hari minggu tanggal 20 januari 2013 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain dalam tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Buana Mukti Desa Karave Kecamatan

Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, ia terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak kandungannya Irmawati Alias irma Binti Asraruddin melakukan persetubuhan denganya atau orang lain, jika beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut terdakwa melakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi korban Irmawati Alias Irma Binti Asraruddin dipanggil oleh terdakwa dikamar terdakwa, lalu korban Irmawati Alias Irma Binti Asraruddin ditanya oleh terdakwa “ kamu mau jadi pintar ? Mau jadi anak baik?”, lalu korban menjawab “iya”, setelah

itu korban diminta oleh terdakwa untuk meminum segelas air, setelah korban meminum air pemberian terdakwa kemudian korban diajak oleh terdakwa untuk masuk ke kamar mandi, lalu terdakwa ikut masuk ke kamar mandi, korban lalu bertanya “kenapa kita masuk”, yang dijawab oleh terdakwa “diam saja tidak usah bertanya, ikut apa yang bapak bilang” setelah itu terdakwa memegang pundak korban, membuka kancing baju korban dan membuka celana korban lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya ke vagina korban, setelah terdakwa terangsang terdakwa kemudian membuka celananya dan meminta korban memegang alat kelaminnya, setelah alat kelaminnya terangsang terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit

Umum Daerah
Mamuju Utara
Nomor :
435/04/VER/I/201
3/RSUD tanggal 29
Januari 2013 yang
dibuat dan
ditandatangani
dibawah sumpah
jabatan oleh dr.
Komang Juni
Arthawan, dimana
telah melakukan
pemeriksaan
terhadap korban
seseorang
perempuan atas
nama Evi Susianti
Alias Binti
Asraruddin, dengan
hasil pemeriksaan
sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan ditemukan :
a) Perempuan tersebut adalah seorang wanita

- berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu ;
- b) Pakaian rapi, tanpa robekan,
- c) Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- d) Pada korban dilakukan pemeriksaan an:
- Pemeriksaan fisik : keadaan umum jasmani baik
 - Tidak ditemukan adanya luka
- e) Pemeriksaan kandungan
- Rahim: puncak rahim tidak teraba
- f) Pemeriksaan alat kelamin
- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana persetubuhan Anak kandung,
2. berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 29/Pid.B/2013/PN.PKY. yang diteliti tetap dapat

dipertanggungjawabkan,
dan dinyatakan bersalah.

3. Pengaturan mengenai tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2).

B. Saran

1. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Orang tua sebagai kepala rumah tangga harus

memperhatikan anaknya dan menjaga hingga dewasa bukan disalahgunakan seperti hal semacam ini menyuruh anak bersetubuh terhadapnya hingga anak tidak dapat berkembang demi masa depannya.

2. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah persetubuhan terhadap anak kandung yang di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini.
3. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap

korbannya, serta anak sebagai korban pers.
mengedepankan hak-hak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Bandung : Alumni, 2006

Rukmini.M. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*.P.T Alumni. Bandung. 2009

Arif Gosita. Yang dikutip oleh Maidin Gultom Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.

(Dalam Bukunya Sri Widoyati Soekito.Yang dikutip oleh Maidin Gultom. Anak dan Wanita Dalam Hukum.Jakarta LP3S)

SR.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Novianto, D.*Tinjauan Tentang Keturutan Serta Istri Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dibawah Umur*.Surakarta.2009,

Setiawan. S. *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*.Surakarta. 2010

C. Perundang-undangan

Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5237-5237)

Perlindungan Anak dan Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem peradilan pidana anak (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332-5332)



BIODATA

Nama : Syamsuri S. Samauna

TTL : Pasangkayu, 16 September 1992

Alamat : Jln.Lakatu Palu Barat

No. HP : 085299201920

Email : Syamstardevil@yahoo.co.id

Nama Orang Tua

a. Ayah : Samsir Samauna

b. Ibu : Nurfaida Hi. Gani